

STUDI LITERATUR: DINAMIKA KESENJANGAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM) DENGAN KURIKULUM DIGITAL

Fuad Abdillah¹, Feri Bogianto, Siti Fatimatun³, Heni Puspitasari⁴, Luluk Ellyana⁵

Prodi PJJ PVTM, Universitas Ivet, Semarang, Indonesia¹

Prodi Magister Pendidikan, Universitas Ivet, Semarang, Indonesia²³⁴⁵

e-mail: fuadabdillah88@gmail.com

ABSTAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dinamika pengembangan Kurikulum Digital di era digital dan menelaah kesenjangan antara konsep dan praktik implementasi merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Selain itu, studi ini berupaya mendialogkan harapan filosofis yang terkandung dalam konsep Kurikulum Digital dan MBKM dengan realitas dan kesenjangan penerapannya di lapangan guna memperoleh gambaran yang holistik. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) dengan analisis tematik dan analisis isi. Ditemukan kesenjangan akses teknologi yang signifikan dan kebijakan pemerintah yang parsial serta tidak konsisten MBKM terbukti mendorong otonomi kampus dan kolaborasi antara perguruan tinggi dan industri (*Triple Helix*). Namun, secara kritis, implementasi MBKM berisiko menjadi pragmatis/agen kapitalis (khususnya program magang) alih-alih berfokus pada nilai humanisasi Hambatan operasional meliputi masalah konversi SKS, kurangnya dukungan pendanaan PTS kecil, dan kebutuhan mendesak akan kebebasan dari formalitas dalam belajar serta infrastruktur yang memadai. Tanpa pemerataan infrastruktur yang adil dan pelatihan berkelanjutan, Kurikulum Digital berisiko memperlebar ketimpangan pendidikan Keberhasilan MBKM bergantung pada komitmen serius dari semua pihak, dukungan sistemik, dan implementasi yang selaras dengan nilai filosofis (*humanisme dan progresivisme*). Studi ini memberikan analisis kritis holistik kebijakan pendidikan di Indonesia dan menegaskan perlunya strategi terpadu antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem pendidikan digital yang adil, inklusif, dan berkelanjutan

Kata Kunci: *Implementasi Kebijakan, MBKM, Kurikulum Digital, Kesenjangan*

ABSTRACT

This study aims to examine the dynamics of Digital Curriculum development in the digital era and examine the gap between the concept and practice of implementing the Independent Learning Campus (MBKM). In addition, this study seeks to explore the philosophical hopes contained in the concept of the Digital Curriculum and MBKM with the reality and gaps in their implementation in the field to obtain a holistic picture. This study uses a library research method with thematic analysis and content analysis. It was found that there is a significant gap in technology access and partial and inconsistent government policies. MBKM has been proven to encourage campus autonomy and collaboration between universities and industry (Triple Helix). However, critically, the implementation of MBKM risks becoming pragmatic/capitalist (particularly the internship program) rather than focusing on humanization values. Operational obstacles include the issue of credit unit (SKS) conversion, the lack of funding support for small private universities (PTS), and the urgent need for freedom from formal learning and adequate infrastructure. Without equitable distribution of infrastructure and ongoing training, the Digital Curriculum risks widening educational inequality. The success of MBKM depends on a serious commitment from all parties, systemic support, and implementation aligned with philosophical

values (humanism and progressivism). This study provides a holistic critical analysis of education policy in Indonesia and emphasizes the need for an integrated strategy between the government, schools, and the community to create a fair, inclusive, and sustainable digital education ecosystem.

Keywords: *Policy Implementation, MBKM, Digital Curriculum, Disparity*

PENDAHULUAN

Transformasi pendidikan berbasis digital telah menjadi respons strategis terhadap percepatan disrupsi teknologi dan tuntutan kompetensi abad ke-21. Dalam konteks global, digitalisasi tidak lagi dipandang sebagai pelengkap, melainkan sebagai fondasi baru sistem pembelajaran yang dinamis, inklusif, dan adaptif (Na Li, 2022; Samane-cutipa et al., 2022). Perubahan ini menuntut kurikulum bergerak dari dokumen statis menjadi kerangka responsif yang mengintegrasikan literasi digital, pemikiran kritis, kolaborasi lintas disiplin, serta keterampilan teknis yang relevan dengan dunia kerja (Zagami et al., 2018; Harijanto et al., 2024). Di Indonesia, upaya tersebut diwujudkan melalui kebijakan Merdeka Belajar–Kampus Merdeka (MBKM), yang secara eksplisit menghubungkan transformasi kurikuler dengan agenda digitalisasi pendidikan tinggi dan menengah.

Namun, implementasi kebijakan ini menghadapi kesenjangan multidimensi. Secara filosofis, MBKM dan kurikulum digital dibangun di atas nilai humanisme, progresivisme, dan prinsip sistem among Ki Hajar Dewantara yang menekankan kebebasan, kemandirian, dan pengembangan karakter (Kardiyem, 2023). Namun, praktik di lapangan sering kali bergeser ke arah pragmatisme operasional yang mengabaikan orientasi humanistik tersebut (Syauqi et al., 2022). Secara struktural, disparitas infrastruktur digital masih sangat tajam (Schweri et al., 2021). Data PISA tahun 2022 (OECD, 2023) menunjukkan bahwa 63% sekolah di wilayah pedesaan tidak memiliki akses internet stabil, hal ini dikuatkan dari hasil studi (Hamilaturroyya, 2025), sementara 68% guru mengaku tidak siap mengintegrasikan teknologi secara pedagogis (Nugraha et al., 2021; Marhamah, 2024; ; Fanani, 2023). Ketimpangan ini diperparah oleh minimnya pelatihan berkelanjutan dan distribusi sumber daya yang tidak merata, terutama di Perguruan Tinggi Swasta (PTS) kecil dan daerah 3T. Secara kebijakan, meskipun MBKM mendorong kolaborasi *triple helix* (perguruan tinggi industri pemerintah), implementasinya kerap terhambat oleh ketidakkonsistenan konversi SKS, lemahnya mekanisme monitoring, serta miskomunikasi antar-pemangku kepentingan (Lembong et al., 2023; Hasanah, 2022; Suratman et al., 2023).

Sejumlah penelitian terdahulu memang telah memberikan kontribusi berarti dalam memetakan aspek-aspek parsial dari transformasi digital dalam pendidikan. Misalnya, Permana et al. (2023) mengidentifikasi hambatan infrastruktur di wilayah 3T sebagai penghambat utama akses layanan pendidikan digital; Nugraha et al. (2021), menyoroti rendahnya kesiapan pedagogis guru dalam mengintegrasikan teknologi; sementara Utami & Suswanto (2022), menganalisis kerangka kebijakan MBKM dari perspektif reformasi kurikuler. Namun, pendekatan-pendekatan tersebut cenderung bersifat sektoral memfokuskan analisis pada satu lapisan sistem (teknis, individu, atau regulatif) tanpa membangun keterhubungan antardimensi.

Sementara itu, Syauqi et al. (2022), secara eksplisit menegaskan bahwa belum ada studi yang secara sistematis dan holistik mengintegrasikan tiga lapisan kritis: (1) dimensi filosofis, yang mencakup nilai humanisme, otonomi belajar, dan visi pendidikan progresif; (2) dimensi struktural, yang meliputi disparitas infrastruktur, kapasitas institusional, dan ketimpangan geografis; serta (3) dimensi kebijakan, yang mencakup konsistensi regulasi, mekanisme implementasi, dan tata kelola kolaboratif antarpemangku kepentingan. Akibatnya, diskusi

akademik selama ini masih gagal menjelaskan mengapa meskipun didukung oleh landasan normatif yang kuat dan kebijakan yang ambisius transformasi pendidikan digital dan MBKM justru berisiko memperdalam ketimpangan, menguatkan formalisme administratif, dan mengaburkan orientasi humanistik.

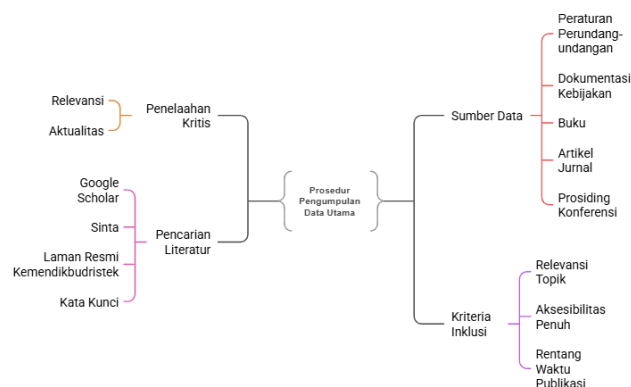
Celah analitis ini sangat krusial, menurut Stocchetti (2020), transformasi pendidikan di era digital bukan sekadar persoalan adopsi teknologi atau penyesuaian kurikulum, melainkan proses negosiasi kompleks antara nilai, kekuasaan, dan struktur. Tanpa lensa multidimensi yang menghubungkan apa yang diidealkan, bagaimana struktur memungkinkan atau menghambat, dan bagaimana kebijakan diterjemahkan (La Barbera et al., 2023). Maka Datnow et al. (2023), berpendapat diagnosis terhadap kegagalan implementasi akan tetap dangkal terjebak pada narasi kekurangan anggaran atau pelatihan, tanpa menyentuh akar sistemik dari ketimpangan itu sendiri. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menawarkan analisis integratif yang mampu menangkap ketegangan antara visi transformatif dan realitas fragmentatif dalam ekosistem pendidikan digital Indonesia.

Berdasarkan konteks tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengkaji dinamika pengembangan kurikulum digital dalam kaitannya dengan agenda transformasi digital pendidikan; (2) menganalisis implementasi MBKM sebagai kebijakan operasional kurikulum digital di perguruan tinggi; dan (3) mendialogkan kesenjangan antara visi filosofis dan realitas struktural-kebijakan guna merumuskan rekomendasi strategis bagi ekosistem pendidikan yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang diperkaya oleh perspektif hermeneutika filosofis. Pendekatan ini memungkinkan eksplorasi, interpretasi, dan sintesis kritis terhadap literatur akademik mengenai dinamika pengembangan Kurikulum Digital dan implementasi kebijakan Merdeka Belajar–Kampus Merdeka (MBKM). Hermeneutika filosofis digunakan untuk mendialogkan visi filosofis kebijakan dengan realitas implementasinya, mengungkap ketegangan antara idealisme humanistik dan praktik yang cenderung pragmatis.

Data dikumpulkan melalui penelaahan kritis terhadap sumber-sumber tertulis yang dipilih secara purposif berdasarkan relevansi tematik, kredibilitas akademik, dan aktualitas (utamanya publikasi lima tahun terakhir, kecuali karya klasik yang menjadi fondasi teori). Sumber data meliputi jurnal ilmiah terindeks (Sinta dan Scopus), buku akademik, dokumen kebijakan pemerintah, serta laporan resmi terkait transformasi digital dalam pendidikan tinggi. Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini tersaji dalam gambar berikut:



Gambar 1. Prosedur Pengumpulan Data

Gambar 1 menunjukkan prosedur pengumpulan data utama dalam penelitian melalui tinjauan literatur sistematis. Sementara untuk analisis data dilakukan melalui kombinasi analisis tematik dan analisis isi dalam tiga tahap sistematis: (1) reduksi data, yaitu seleksi dan peringkasan informasi relevan; (2) kategorisasi tematik, mengelompokkan data ke dalam tema seperti kesenjangan infrastruktur, kapasitas SDM, dan dukungan sistemik; serta (3) interpretasi mendalam, yang bertujuan membangun narasi holistik dan kritis mengenai kesenjangan antara konsep dan praktik Kurikulum Digital serta MBKM.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Temuan dalam penelitian ini diperoleh melalui sintesis tematik terhadap 22 sumber primer yang memenuhi kriteria inklusi (terbit 2018–2025, relevan secara tematik, dan berasal dari jurnal bereputasi atau dokumen kebijakan resmi). Analisis mengidentifikasi tiga kelompok temuan utama: (1) kesenjangan infrastruktur digital, (2) keterbatasan kompetensi pendidik, dan (3) tantangan implementasi kebijakan MBKM.

Sintesis literatur menunjukkan disparitas akses teknologi yang signifikan antara institusi pendidikan di wilayah perkotaan dan pedesaan. Data dari PISA tahun 2022 dalam OECD (2023), dan temuan sejumlah studi (Hamilaturroya, 2025; Permana et al., 2023) menunjukkan bahwa 63% sekolah di pedesaan tidak memiliki akses internet stabil, dibandingkan hanya 12% di perkotaan. Selain itu, lebih dari separuh sekolah di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) tidak memiliki perangkat digital memadai untuk mendukung pembelajaran daring.

Mayoritas pendidik baik guru di pendidikan dasar-menengah maupun dosen di perguruan tinggi belum memiliki kesiapan yang memadai untuk mengintegrasikan teknologi secara bermakna dalam proses pembelajaran. Berdasarkan konsistensi data dari tiga studi utama (Nugraha et al., 2021; Marhamah, 2024; Fanani, 2023), sekitar 68% responden mengakui tidak menguasai keterampilan pedagogis digital, yaitu kemampuan menggabungkan pengetahuan teknologis, konten pembelajaran, dan strategi pedagogis secara terintegrasi (TPACK). Ketidaksiapan ini bukan semata-mata disebabkan oleh kurangnya akses terhadap alat digital, melainkan lebih pada minimnya kompetensi untuk merancang, mengelola, dan mengevaluasi pembelajaran berbasis teknologi yang kontekstual, partisipatif, dan berorientasi pada pengembangan kompetensi abad ke-21. Lebih jauh, pelatihan yang selama ini diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun institusi pendidikan cenderung bersifat teknosentris yang hanya fokus pada penguasaan fitur aplikasi atau perangkat tertentu, tanpa menyentuh dimensi pedagogis atau desain instruksional. Pelatihan tersebut juga umumnya berdurasi singkat, tidak diikuti oleh pendampingan berkelanjutan, dan tidak terintegrasi ke dalam sistem pengembangan profesi berkelanjutan (*continuous professional development*). Akibatnya, banyak pendidik kesulitan mentransformasi teknologi dari sekadar alat administratif atau visualisasi menjadi medium untuk memfasilitasi eksplorasi, kolaborasi, dan refleksi kritis dalam kelas.

Analisis tematik terhadap literatur empiris mengungkap empat tantangan struktural utama dalam implementasi kebijakan Merdeka Belajar–Kampus Merdeka (MBKM) di perguruan tinggi. Pertama, terdapat ketidakkonsistenan dalam mekanisme konversi Satuan Kredit Semester (SKS) antar-institusi, yang berimplikasi pada ketidakadilan akademik dan hambatan mobilitas belajar lintas perguruan tinggi. Kedua, pendanaan yang tidak merata khususnya bagi Perguruan Tinggi Swasta (PTS) berskala kecil menghambat kapasitas institusional dalam menyelenggarakan program MBKM secara optimal, mulai dari pelatihan dosen hingga pengembangan kemitraan strategis. Ketiga, rendahnya partisipasi dosen sebagai Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) mencerminkan beban kerja tambahan yang tidak

diimbangi dengan insentif atau dukungan sistemik, sehingga mengurangi kualitas pendampingan akademik selama masa magang. Keempat, terjadi miskomunikasi antara tiga pihak utama perguruan tinggi, mitra industri, dan mahasiswa mengenai ekspektasi, tanggung jawab, serta indikator keberhasilan dalam program magang, yang berpotensi menurunkan relevansi pembelajaran dan kepuasan peserta. Temuan ini didukung oleh data empiris dari beberapa hasil temuan yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Ringkasan Temuan Utama Berdasarkan Sintesis Literatur

Dimensi	Temuan Utama	Sumber pendukung
Infrastruktur Digital	63% sekolah pedesaan tidak memiliki akses internet stabil; keterbatasan perangkat di wilayah 3T	(Hamilaturroyya, 2025;Permana et al., 2023;OECD, 2023)
Kompetensi Pendidik	68% guru/dosen menyatakan tidak siap mengintegrasikan teknologi secara pedagogis	(Nugraha et al., 2021; Marhamah, 2024;Fanani, 2023)
Implementasi MBKM	Masalah konversi SKS, pendanaan PTS, minimnya keterlibatan DPL, dan miskomunikasi mitra magang	(Lembong et al., 2023;Hasanah, 2022)

Tabel 1 menunjukkan bahwa tantangan utama dalam peningkatan mutu pendidikan masih berakar pada ketimpangan akses digital, rendahnya kesiapan pendidik dalam memanfaatkan teknologi, serta berbagai kendala teknis dalam implementasi kebijakan MBKM. Keterbatasan jaringan dan perangkat di daerah terpencil terus memperlebar jurang kualitas layanan pendidikan (Hamilaturroyya, 2025; Permana et al., 2023; OECD, 2023), sementara sebagian besar guru dan dosen masih memerlukan penguatan kompetensi untuk mengintegrasikan teknologi dalam praktik pembelajaran yang sistematis (Nugraha et al., 2021; Marhamah, 2024; Fanani, 2023). Di sisi lain, pelaksanaan MBKM masih terhambat oleh persoalan administratif dan koordinasi antar pemangku kepentingan, seperti penyesuaian beban studi dan sinkronisasi peran mitra magang (Lembong et al., 2023; Hasanah, 2022). Keseluruhan temuan ini menegaskan bahwa peningkatan kualitas pendidikan membutuhkan perbaikan struktural sekaligus penguatan kapasitas sumber daya manusia agar transformasi pendidikan dapat berjalan lebih efektif.

Pembahasan

Diskoneksi antara Konsep dan Praktik Kurikulum Digital

Hasil menunjukkan adanya ketimpangan akses infrastruktur digital yang mencapai 63% antara sekolah di wilayah perkotaan dan pedesaan, serta rendahnya kesiapan guru dalam mengintegrasikan teknologi secara pedagogis. Penjelasan atas temuan ini terletak pada asimetri kebijakan digitalisasi yang lebih menekankan pada penyediaan platform nasional tanpa disertai pendekatan kontekstual berbasis wilayah. Ketimpangan infrastruktur bukan semata-mata masalah teknis, melainkan cerminan dari kebijakan yang belum sepenuhnya mempertimbangkan disparitas geografis dan kapasitas institusional. Sementara itu, pelatihan guru yang bersifat teknis dan tidak berkelanjutan mencerminkan paradigma instruksional yang masih terjebak pada *tool-centered* daripada *pedagogy-centered*.

Perbandingan literatur menunjukkan pola serupa di negara berkembang. Samane-cutipa et al. (2022), menemukan bahwa kesenjangan digital di Amerika Latin juga memperparah ketidaksetaraan pendidikan ketika pelatihan guru tidak menyertakan kompetensi pedagogis digital. Di Indonesia, temuan ini diperkuat oleh Nugraha et al. (2021), yang menyoroti minimnya integrasi *Technological Pedagogical Content Knowledge* (TPACK) dalam pelatihan guru. Berbeda dengan negara maju seperti Finlandia, di mana transformasi digital diintegrasikan melalui kurikulum nasional yang partisipatif dan berbasis riset lokal (Zagami et al., 2018). Implikasi dari diskoneksi ini adalah risiko transformasi digital yang bersifat elitis hanya efektif di wilayah dengan infrastruktur memadai dan SDM berkualitas. Tanpa pemerataan akses dan pendekatan diferensiasi dalam pelatihan, kurikulum digital berpotensi memperlebar ketimpangan pendidikan alih-alih menjadi pemerata.

Implementasi MBKM: Peluang dan Tantangan

Hasil mengungkap bahwa MBKM mendorong otonomi kampus dan kolaborasi *triple helix*, namun dihambat oleh ketidakmerataan pendanaan, konversi SKS yang tidak konsisten, serta risiko komersialisasi program magang (MSIB). Penjelasan terhadap kompleksitas ini bersumber pada dualitas struktural kebijakan. Di satu sisi, MBKM memberikan kebebasan kurikuler; di sisi lain, pelaksanaannya dibatasi oleh kerangka birokrasi dan keterbatasan sumber daya, terutama di Perguruan Tinggi Swasta (PTS) kecil. Ketidakseimbangan ini menunjukkan bahwa desentralisasi kebijakan belum diimbangi dengan penguatan kapasitas institusional secara merata.

Perbandingan literatur menunjukkan bahwa tantangan serupa muncul dalam kebijakan pendidikan berbasis otonomi di Malaysia dan Filipina, di mana kolaborasi industri sering kali mengabaikan dimensi edukatif (Lembong et al., 2023). Namun, kritik terhadap komersialisasi program magang dalam konteks Indonesia perlu dipahami secara empiris, bukan semata-mata teoretis (Syauqi et al., 2022). Schweri et al. (2021) mengingatkan pengawasan yang lemah dan kekakuan kurikulum dapat menyebabkan inefisiensi, karena perusahaan mungkin tidak menggunakan semua keterampilan yang ditentukan atau mungkin perlu melatih keterampilan tambahan yang tidak tercakup, risiko tersebut lebih berkaitan dengan lemahnya pengawasan dan standarisasi pelaksanaan magang, bukan niat filosofis kebijakan. Implikasi utama adalah perlunya *safeguard mechanism* dalam program MSIB antara lain standar upah magang, keterlibatan akademik dalam penilaian, dan akreditasi mitra industri agar tidak menggeser orientasi edukatif menjadi transaksional. Tanpa itu, MBKM berisiko kehilangan legitimasi filosofisnya sebagai gerakan humanisasi pendidikan.

Kesenjangan Filosofis dan Implikasi Kebijakan

Hasil mengidentifikasi bahwa visi humanistik MBKM dan Kurikulum Digital (berakar pada progresivisme, humanisme, dan pemikiran Ki Hajar Dewantara) bertentangan dengan praktik implementasi yang cenderung pragmatis dan birokratis. Penjelasan atas kesenjangan ini terletak pada paradoks antara visi transformatif dan logika administratif. Sementara filosofi pendidikan menekankan kebebasan belajar dan pengembangan karakter, realitas birokrasi justru memperkuat kontrol formal melalui persyaratan administratif yang rigid seperti pelaporan magang, konversi SKS, dan pemantauan berbasis dokumen sehingga mengikis ruang eksplorasi mahasiswa.

Perbandingan literatur menunjukkan bahwa paradoks serupa terjadi dalam reformasi pendidikan global. Menurut Utami & Suswanto (2022), banyak kebijakan “merdeka belajar” gagal karena tidak diiringi perubahan budaya organisasi di tingkat makro maupun mikro.

Sementara itu, Kardiyeem (2023), menegaskan bahwa nilai sistem among Ki Hajar Dewantara yang menekankan pembimbingan, bukan pengawasan belum terinternalisasi dalam struktur MBKM saat ini.

Implikasi kebijakan dari temuan ini adalah urgensi merevisi logika implementasi dari *compliance-based* menjadi *trust-based*. Evaluasi harus berubah dari pengukuran kuantitatif formal menuju penilaian holistik yang melibatkan refleksi mahasiswa dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan. Permana et al. (2023) menguatkan Transformasi pendidikan tidak hanya membutuhkan infrastruktur, tetapi juga ekosistem yang mempercayai proses belajar sebagai ruang eksistensial, bukan semata-mata instrumen

KESIMPULAN

Kajian ini mengidentifikasi kesenjangan signifikan antara konsep ideal Kurikulum Digital dan kebijakan Merdeka Belajar–Kampus Merdeka (MBKM) dengan realitas implementasinya di lapangan. Temuan utama menunjukkan ketimpangan infrastruktur digital, keterbatasan kompetensi pendidik, serta dukungan sistemik yang tidak merata khususnya di institusi pendidikan di daerah terpencil dan perguruan tinggi swasta kecil. Meskipun MBKM mendorong otonomi, kolaborasi *triple helix*, dan peningkatan kompetensi lulusan, risiko komersialisasi program magang dan dominasi formalitas administratif mengancam nilai humanistik yang menjadi dasar filosofis kebijakan tersebut.

Kontribusi penelitian terletak pada analisis holistik yang menghubungkan dimensi filosofis, struktural, dan kebijakan dalam menjelaskan mengapa transformasi pendidikan digital belum mencapai potensi penuhnya. Implikasinya, keberhasilan kurikulum digital dan MBKM bergantung pada pemerataan akses, pelatihan berkelanjutan bagi pendidik, serta penyederhanaan birokrasi yang menghambat kebebasan belajar.

Keterbatasan studi ini terletak pada pendekatan studi kepustakaan yang belum memperoleh data empiris lapangan secara langsung. Untuk itu, direkomendasikan pengembangan strategi terpadu antara pemerintah, institusi pendidikan, dan masyarakat, termasuk evaluasi dampak jangka panjang dan pendanaan berkeadilan guna memperkuat ekosistem pendidikan digital yang inklusif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Datnow, A., Yoshisato, M., Macdonald, B., Trejos, J., & Kennedy, B. C. (2023). Bridging Educational Change and Social Justice: A Call to the Field. *Educational Researcher*, 52(1), 29–38. <https://doi.org/10.3102/0013189X221138837>
- Fanani. (2023). The Urgency of Facilities and Infrastructure in Improving the Quality of High School Education. *Journal of Insan Mulia Education*, 1(2), 38–44. <https://doi.org/10.59923/joinme.v1i2.6>
- Hamilaturroyya. (2025). Dinamika Pengembangan Kurikulum di Era Digital dalam menjawab Kesenjangan Konsep dan Praktik. *Jurnal P4I*, 5(3), 1245–1259. <http://jurnalp4i.com/index.php/learning>
- Harijanto, B., Kusbianto, D., & Timor, A. R. (2024). Sistem Informasi pertukaran Pelajar untuk Mendukung Kurikulum Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBKM). *Jurnal Teknik Ilmu Dan Aplikasi*, 3, 15–21. <https://doi.org/10.33795/jtia.v3i1.70>
- Hasanah, U. (2022). Merdeka Belajar Kampus Merdeka: Tantangan dan Prospek Kedepan. *Tafahus: Jurnal Pengkajian Islam*, 2(1), 26–40. <https://doi.org/10.58573/tafahus.v2i1.15>
- Kardiyeem, E. al. (2023). Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka : Kajian Filsafat Pendidikan

- Barat dan Timur Serta Realitasnya. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 6(2), 291–302. <https://doi.org/10.23887/jfi.v6i2.57668>
- La Barbera, M., Espinosa-Fajardo, J., & Caravantes, P. (2023). Implementing Intersectionality in Public Policies: Key Factors in the Madrid City Council, Spain. *Politics and Gender*, 19(3), 675–702. <https://doi.org/10.1017/S1743923X22000241>
- Lembong, J. M., Lumapow, H. R., & Rotty, V. N. J. (2023). Implementasi Merdeka Belajar Sebagai Transformasi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 9(2), 765–777. <https://doi.org/10.31949/educatio.v9i2.4620>
- Marhamah. (2024). Pelatihan perancangan pembelajaran inovatif abad 21 guru SMA Negeri 16 Palembang. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)*, 5(1), 1153–1160. <https://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i1.2829>
- Na Li, E. A. (2022). Disrupting the disruption: A digital learning HeXie ecology model. *Education Sciences*, 12. <https://doi.org/10.3390/educsci12020063>
- Nugraha, C. A., Kuswandi, D., & Praherdhiono, H. (2021). Teacher professional development to train digital skills with technological pedagogical content knowledge (TPACK). *Jurnal Pendidikan*, 24, 330–340. <https://doi.org/10.21009/jtp.v24i3.31019>
- OECD. (2023). *PISA 2022 results: Volume I (Factsheets)*. https://www.oecd-ilibrary.org/education/pisa-2022-results-volume-i_53f23881-en
- Permana, B. S., Insani, G. N., Reygita, H., Rustini, T., Indonesia, U. P., City, B., & Province, W. J. (2023). Lack of educational facilities and infrastructure in Indonesia. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 2(2), 1076–1080. <https://doi.org/10.57235/aurelia.v2i2.646>
- Samane-Cutipa, V. A., Quispe-Quispe, A. M., Talavera-Mendoza, F., & Cesar, H. (2022). Digital gaps influencing the online learning of rural students in secondary education: A systematic review. *International Journal of Information and Education Technology*, 12(7). <https://doi.org/10.18178/ijiet.2022.12.7.1671>
- Schweri, J., Aepli, M., & Kuhn, A. (2021). The costs of standardized apprenticeship curricula for training firms. *Empirical Research in Vocational Education and Training*, 13(1). <https://doi.org/10.1186/s40461-021-00120-4>
- Stocchetti, M. (2020). *The digital age and its discontents: Critical reflections in education*. <https://doi.org/10.33134/HUP-4>
- Suratman, Salamah, U., Amini, S., & Navisa, F. D. (2023). Independent learning–independent campus: From the perspective of justice and utilitarian theories. *Law and Humanities Quarterly Reviews*, 2(1), 34–43. <https://doi.org/10.31014/aior.1996.02.01.49>
- Syauqi, K., Munadi, S., & Bruri Triyono, M. (2022). Sustainable partnership strategy: Case studies in vocational high schools and partner industries. *The Qualitative Report*, 27(8), 1483–1498. <https://doi.org/10.46743/2160-3715/2022.5481>
- Utami, Y. P., & Suswanto, B. (2022). The educational curriculum reform in Indonesia: Supporting “Independent Learning–Independent Campus (MBKM).” *SHS Web of Conferences*, 149, 01041. <https://doi.org/10.1051/shsconf/202214901041>
- Zagami, J., Bocconi, S., Starkey, L., Wilson, J. D., Gibson, D., Downie, J., Malyn-Smith, J., & Elliott, S. (2018). Creating future ready information technology policy for national education systems. *Technology, Knowledge and Learning*, 23(3), 495–506. <https://doi.org/10.1007/s10758-018-9387-7>